



Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan Per Kapita Sebagai Variabel Mediasi

Ali Asdon Tanjung^{1*}, Dafa Ariza², Feryanto Nababan³, Raymond Panuturi Siboro⁴, Zaki Edi Saputra⁵, Armin Rahmansyah Nasution⁶, Nasrullah Hidayat⁷
^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Medan

Email: aliasdonalilamaje@gmail.com, dafaariza25@gmail.com, ferinababan7@gmail.com,
raymonsiboro963@gmail.com, zaskia0612@gmail.com, armin@unimed.ac.id,
nasrullah@unimed.ac.id,

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Korespondensi email: aliasdonalilamaje@gmail.com *

Abstract; *This study aims to analyze the effect of population on poverty with per capita income as a mediating variable in Aceh Province, a special autonomy region that still faces structural poverty challenges post-conflict and natural disasters. Using a quantitative approach with panel data from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia, and the Financial Services Authority (OJK), this study analyzes the relationship between population growth, per capita income, and poverty percentage through path analysis with the Sobel test. The results show that population growth has a negative and significant effect on per capita income, as well as a positive impact on increasing poverty. Meanwhile, per capita income is shown to have a negative and significant effect on poverty, indicating that an increase in income can reduce the poverty rate. Mediation analysis reveals that per capita income acts as a significant intervening variable, proving that population growth not only affects poverty directly, but also indirectly through a decrease in per capita income. These findings highlight the importance of policies that control population growth while promoting economic growth based on income generation to reduce poverty in Aceh. The policy implications of this study emphasize the need for integrated development programs, improved access to education and health, and strengthening productive sectors to strengthen the economic resilience of the community.*

Keywords: Poverty, Population, Per Capita Income.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan dengan pendapatan per kapita sebagai variabel mediasi di Provinsi Aceh, sebuah wilayah dengan otonomi khusus yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural pasca-konflik dan bencana alam. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini menganalisis hubungan antara pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, dan persentase kemiskinan melalui *path analysis* dengan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, sekaligus berdampak positif terhadap peningkatan kemiskinan. Sementara itu, pendapatan per kapita terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Analisis mediasi mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita berperan sebagai variabel intervening yang signifikan, membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya memengaruhi kemiskinan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui penurunan pendapatan per kapita. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan yang mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya program pembangunan yang terintegrasi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor produktif guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Kemiskinan, Penduduk, Pendapatan Per Kapita.

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan hak otonomi khusus sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan pasca-konflik. Otonomi khusus merupakan bentuk pengembangan dari otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada wilayah-wilayah tertentu karena memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat lima daerah yang mendapatkan status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat (Safrida, 2019).

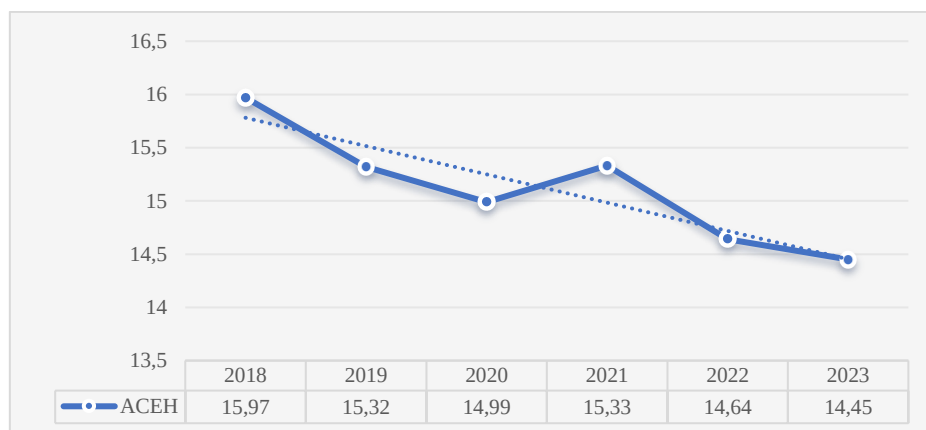
Meskipun telah mendapatkan status otonomi khusus, Aceh masih menghadapi tantangan signifikan akibat dampak dari konflik berkepanjangan serta bencana alam, termasuk tsunami dahsyat yang melanda pada tahun 2004. Meskipun berbagai program pembangunan telah dicanangkan pasca bencana, masalah struktural seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal, keterbatasan infrastruktur, dan akses terbatas terhadap layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, terus memicu kemiskinan.

Selain itu, inflasi tinggi, terutama pada harga pangan, memperburuk daya beli masyarakat, menambah kesulitan bagi kelompok masyarakat miskin yang pengeluarannya sebagian besar untuk konsumsi bahan makanan pokok. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal tetapi juga oleh dinamika kebijakan nasional, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, dan program pembangunan yang kurang terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat. Berdasarkan laporan BPS dan Bappenas, perlu ada reformasi lebih dalam untuk mengatasi akar masalah kemiskinan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakcukupan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok individu. Sumber daya tersebut tidak terbatas hanya pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup segala bentuk kekayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Pinontoan, 2020). Persentase kemiskinan mengacu pada proporsi penduduk dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan dibandingkan total populasi di suatu wilayah. Garis kemiskinan diukur

berdasarkan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan non-makanan, yang dihitung dalam satuan moneter tertentu. Dalam hal ini kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga multidimensional, meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan kesempatan kerja yang layak.

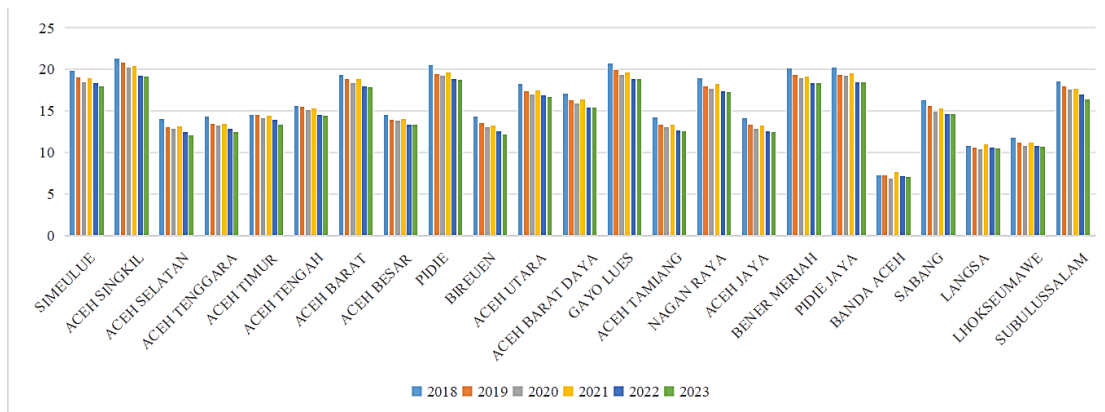
Data BPS menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan kecil dari tahun ke tahun, persentase kemiskinan di sebagian besar kabupaten/kota di Aceh tetap tinggi, dengan rata-rata di atas 15%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam periode 2018-2023, sebagian besar wilayah di Aceh mengalami fluktuasi angka kemiskinan yang signifikan, di mana beberapa kabupaten seperti Aceh Singkil dan Gayo Lues mencatat angka kemiskinan di atas 20%, jauh lebih tinggi dibandingkan Banda Aceh yang memiliki persentase kemiskinan sekitar 7%. Disparitas ini mencerminkan kesenjangan ekonomi antarwilayah dan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pemerataan pembangunan.



Sumber: BPS Provinsi Aceh (2025)

Gambar 1. Grafik Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh 2018-2023

Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh selama periode 2018-2023, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam penurunan angka kemiskinan di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, Provinsi Aceh memang mencatat penurunan angka kemiskinan dari 15,97% pada tahun 2018 menjadi 14,45% pada tahun 2023. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, penurunan ini tidak terjadi secara merata, dan beberapa kabupaten/kota justru mengalami stagnasi atau fluktuasi yang mengindikasikan adanya masalah struktural dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



Sumber: BPS Provinsi Aceh (2025)

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2018-2023

Pada gambar 2. dapat dilihat fluktuasi kemiskinan per kabupaten kota. Aceh Singkil mengalami penurunan dari 21,25% pada tahun 2018 menjadi 19,15% pada tahun 2023. Namun, penurunan ini tidak konsisten dan terhenti pada tahun-tahun terakhir, di mana kemiskinan hanya turun 0,03% dari tahun 2022 ke 2023. Wilayah seperti Simeulue bahkan menunjukkan tren yang lebih fluktuatif, dengan penurunan di awal periode (19,78% pada 2018 menjadi 18,49% pada 2020), tetapi kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 18,98% pada tahun 2021 sebelum turun lagi di tahun berikutnya. Fluktuasi ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Gap yang lebih jelas terlihat di Pidie, yang mencatat angka kemiskinan tinggi namun menunjukkan penurunan yang sangat lambat

Permasalahan utama yang muncul dari data ini adalah ketimpangan antar-wilayah dalam hal keberhasilan menurunkan kemiskinan. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi mengalami laju penurunan yang lebih lambat, sementara daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini menandakan adanya gap besar dalam efektivitas program penanggulangan kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Fenomena ini mencerminkan ketidakmerataan dalam akses dan implementasi kebijakan sosial-ekonomi, yang berpotensi dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan di setiap wilayah.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang memengaruhi persentase kemiskinan di Aceh. Pertumbuhan populasi yang tinggi, terutama di daerah

pedesaan, sering kali tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, sehingga memperbesar jumlah penduduk miskin. Peningkatan populasi memicu tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas, sementara kapasitas ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang layak tidak berkembang secara proporsional. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendapatan per kapita di sebagian besar wilayah, yang merefleksikan kapasitas ekonomi daerah yang lemah untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang rendah juga menjadi faktor intervensi dalam hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan, di mana daerah dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori ekonomi yang relevan. Pertama, Teori Jebakan Kependudukan (*Population Trap*) oleh Thomas Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan akan menyebabkan kemiskinan massal (Malthus, 1798). Pertumbuhan populasi yang tinggi tanpa diimbangi oleh peningkatan produktivitas ekonomi dapat memicu peningkatan kemiskinan. Kedua, Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan keterbatasan investasi di Aceh, laju pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengimbangi pertumbuhan populasi, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan per kapita dan kemiskinan. Ketiga, Teori Neo-Klasik menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi (Suparmono, 2018). Kurangnya akses terhadap teknologi modern dan modal investasi menjadi penghambat utama dalam peningkatan pendapatan per kapita dan pengentasan kemiskinan.

Implementasi otonomi daerah bukan hanya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, termasuk peran elite politik, kepada masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang optimal atau pelayanan prima sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik (O. Sinaga, 2010). Dengan menggunakan model analisis yang melibatkan laju pertumbuhan penduduk, persentase kemiskinan, dan pendapatan per kapita, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana faktor demografi dan ekonomi saling memengaruhi kemiskinan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar ini meliputi berbagai aspek esensial seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya lainnya yang mendukung kesejahteraan. Dalam ekonomi, (Todaro & Smith, 2020) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang secara ekonomi untuk mencapai standar hidup rata-rata yang berlaku di suatu masyarakat atau wilayah. Ini berarti, kemiskinan tidak hanya berbicara tentang kekurangan uang, tetapi juga tentang keterbatasan sumber daya yang membatasi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Namun, penting untuk memahami bahwa kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang ekonomi semata. Masalah ini juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan politik yang berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan kemiskinan. (Sen, 1999) menekankan bahwa kemiskinan seharusnya dipandang melalui perspektif kemampuan (capabilities), di mana kemiskinan bukan hanya tentang tidak memiliki uang, tetapi tentang kurangnya kebebasan individu untuk mengejar tujuan hidup yang mereka anggap penting. Dengan kata lain, kemiskinan menghambat seseorang dalam mengembangkan potensi diri dan membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini mencakup akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam proses politik.

Pengukuran kemiskinan sering kali dilakukan melalui indikator ekonomi, salah satunya adalah persentase penduduk miskin. Indikator ini berfungsi untuk mengukur proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu ambang batas pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan menggunakan persentase penduduk miskin, pemerintah dan organisasi internasional dapat memperoleh gambaran umum tentang seberapa besar bagian dari populasi yang menghadapi kesulitan ekonomi serius dan membutuhkan intervensi atau bantuan sosial. Namun, meskipun persentase penduduk miskin

memberikan gambaran kuantitatif yang berguna, indikator ini memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kenyataan kemiskinan yang lebih kompleks.

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah Bagian pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga (distribusi pendapatan personal) atau yang dikenal sebagai ukuran pendapatan merupakan salah satu indikator yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Indikator ini menghitung secara langsung jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang atau rumah tangga, tanpa mempertimbangkan asal-usul pendapatan tersebut (Wahed et al., 2021). Para ahli ekonomi umumnya membagi ukuran distribusi pendapatan menjadi dua kategori utama yang digunakan dalam berbagai studi kuantitatif dan analisis kualitatif.

Dua pengukuran tersebut terdiri dari Distribusi Personal (*Personal Distribution*) dan Distribusi Fungsional (*Functional Distribution*). Distribusi ini merujuk pada proporsi pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok individu dalam suatu masyarakat. Pengukuran ini memperlihatkan seberapa besar bagian pendapatan yang diterima oleh tiap orang, biasanya dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok, seperti kuintil atau desil. Distribusi Fungsional (*Functional Distribution*), Distribusi fungsional mengacu pada bagaimana pendapatan dibagi berdasarkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh individu. Faktor-faktor produksi ini meliputi tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan. Dalam analisis ini, pendapatan masyarakat dibagi berdasarkan kontribusi dari masing-masing faktor produksi.

Teori Neo Klasik mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan perkembangannya dari satu periode ke periode lainnya, biasanya dilihat melalui Tingkat pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita mengukur tingkat taraf pertumbuhan ekonomi yang dicapai, Sedangkan pertambahan pendapatan per kapita dari satu tahun ke tahun lainnya mengukur perkembangan taraf kemakmuran masyarakat yang dicapai (Amalia et al., 2022).

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2023), yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara pendapatan per kapita dan kemiskinan di Kepulauan Nias. Hasil analisis yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita secara langsung berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, saat pendapatan per kapita

masyarakat meningkat, hal ini berkontribusi pada pengurangan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah kependudukan yang signifikan adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang. Pertumbuhan yang sangat cepat ini memicu berbagai tantangan dalam upaya pembangunan, terutama karena tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Jumlah tenaga kerja meningkat dengan pesat, sementara kemampuan negara-negara berkembang untuk menyediakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Akibat dari ketidakseimbangan ini, pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti struktur penduduk yang didominasi oleh usia muda, meningkatnya angka pengangguran, urbanisasi yang cepat, dan masalah lainnya (Wahed et al., 2021).

Teori Jebakan Kependudukan oleh Malthus, menurut (Malthus, 1798), karena setiap individu dalam masyarakat hanya memiliki lahan dalam jumlah terbatas, kontribusi marginal atau produksi pangan akan semakin berkurang. Dalam masyarakat agraris, pendapatan per kapita diartikan sebagai jumlah produksi pangan per orang. Oleh karena itu, ketika pertumbuhan produksi pangan tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk yang cepat, pendapatan per kapita akan menurun. Penurunan ini bisa menjadi begitu drastis hingga mencapai tingkat yang sedikit di atas subsistensi, atau kemiskinan absolut (Junaidi & Hardiani, 2009).

Teori Jebakan Kependudukan oleh Malthus didukung oleh penelitian (Salsabil & Rianti, 2023), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, di mana peningkatan jumlah penduduk cenderung menaikkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Bertambahnya populasi membuat kebutuhan akan sumber daya dasar seperti lahan, pangan, dan fasilitas publik meningkat lebih cepat daripada kapasitas sumber daya yang ada.

Teori Harrod Domar, teori ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (*warranted rate of growth*), maka pendapatan per kapita akan menurun karena lapangan kerja dan kapasitas ekonomi tidak cukup untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Di sisi lain, jika pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita akan meningkat,

tetapi bisa memicu inflasi jika tidak ada keseimbangan antara permintaan dan produksi (Muchtolifah, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yang memanfaatkan data panel sebagai sumber informasi. Metode kuantitatif sendiri merupakan pendekatan penelitian yang mengandalkan data numerik untuk mengumpulkan informasi dan menggali pengetahuan terkait topik yang sedang diteliti (Rahmadi, 2011). Data panel merupakan jenis data yang mengombinasikan data *cross section* dan data *time series*, sehingga memungkinkan analisis terhadap variabel-variabel yang diamati pada berbagai individu atau entitas selama periode waktu tertentu (Kartiningrum et al., 2022). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sekunder adalah data yang telah diproses atau dikumpulkan oleh pihak lain, dalam hal ini oleh BPS, sebelum digunakan untuk analisis penelitian (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini memiliki 3 jenis variabel, yaitu kemiskinan sebagai variabel terikat, laju pertumbuhan penduduk sebagai variabel bebas, dan pendapatan per kapita sebagai variabel mediasi. Variabel dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang sebelumnya dilakukan uji pemilihan model dan telah lulus dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Persamaan *path analysis* yang melibatkan variabel mediator, serta disesuaikan dengan jenis data yang disusun menjadi 2 persamaan sebagai berikut:

Persamaan Struktural I

$$PPK_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{1it} + e_{it}$$

Persamaan Struktural II

$$M_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{1it} + \beta_2 PPK_{2it} + e_{it}$$

dimana:

α : konstanta

β : koefisien regresi

M_{it} : Tingkat Kemiskinan (%)

PPK_{1it} : Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)

PP_{2it} : Pertumbuhan Penduduk (%)

i : entitas ke- i

t : periode ke- t

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Dalam proses penelitian, sangatlah penting untuk memastikan bahwa model yang digunakan dalam analisis data mampu menggambarkan hubungan yang sebenarnya antara variabel-variabel yang diteliti. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab III mengenai metodologi penelitian, tahapan analisis metode data panel memerlukan uji kecocokan model untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Uji ini terdiri dari tiga tahapan penting, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Lagrange Multiplier Test.

Uji Chow berfungsi untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara *Common Effects Model* (CEM) dan *Fixed Effects Model* (FEM). Selanjutnya, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effects Model* (FEM) dan *Random Effects Model* (REM), yang sangat penting dalam analisis panel. Terakhir, Lagrange Multiplier Test berfungsi untuk menentukan apakah REM lebih baik dibandingkan dengan CEM. Berikut merupakan hasil pemilihan model pada penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Kriteria	Persamaan Struktural I		Persamaan Struktural II	
		Hasil	Di Terima	Hasil	Di Terima
Chow	Prob. < 0,05 (FEM) Prob. > 0,05 (CEM)	0,0000	FEM	0,0000	FEM
Hausman	Prob. < 0,05 (FEM) Prob. > 0,05 (REM)	0,8726	REM	0,5107	REM
Lagrange Multiplier	Prob. < 0,05 (REM) Prob. > 0,05 (CEM)	0.0000	REM	0.0000	REM

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, dapat di tarik kesimpulan bahwa model yang terbaik digunakan pada penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM) baik pada persamaan struktural I dan II.

Uji Asumsi Klasik

Setelah menentukan model terbaik yang akan digunakan dalam analisis data, langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas dan keandalan hasil analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Pemilihan kedua uji asumsi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya dapat secara efektif mewakili tahapan uji dalam metode path analysis dengan data panel. Uji autokorelasi diperlukan untuk

mendeteksi adanya hubungan antara residual yang satu dengan yang lain dalam model, sedangkan uji heterokedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat varians yang tidak konstan dalam residual.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Kriteria	Persamaan Struktural I		Persamaan Struktural II	
		Hasil	Kesimpulan	Hasil	Kesimpulan
Heteroskedastisitas	Prob. > 0,05	0,1031	Lulus uji	0,7127	Lulus uji
Autokorelasi	Durbin-Waston: -2 hingga 2	0,8334	Lulus uji	1,9884	Lulus uji

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa pada persamaan structural I dan II telah lulus dari dua uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Jalur

1. Analisis Jalur Langsung

Analisis pengaruh langsung dalam penelitian ini dilakukan pada variabel pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan per kapita dan variabel pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Pengaruh Langsung Terhadap Variabel Pendapatan Per Kapita

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.894097	0.303096	29.34419	0.0000
Pertumbuhan Penduduk	-0.221256	0.074443	-2.972144	0.0054

Pada tabel 3. variabel pertumbuhan penduduk memiliki nilai coefficient yaitu -0.221256 dan t-statistic sebesar -2.972144 dengan nilai prob. signifikansi sebesar 0.0054 < 0.05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pendapatan per kapita.

Tabel 4. Hasil Analisis Pengaruh Langsung Terhadap Variabel Kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.60175	3.722000	16.01337	0.0000
Pendapatan Per Kapita	-5.007744	0.404811	-12.37058	0.0000
Pertumbuhan Penduduk	-0.691945	0.190302	-3.636031	0.0009
R-squared	0.831171	F-statistic		81.23222
Adj. R-squared	0.820939	Prob(F-statistic)		0.000000

Dari tabel 4 dapat di lihat bahwa nilai koefisien sebesar 55.60175 yang artinya tanpa adanya variabel pendapatan per kapita dan pertumbuhan penduduk, variabel kemiskinan

akan meningkat sebesar 556%. Pada variabel pendapatan per kapita memiliki nilai koefisien sebesar - 5.00774 dengan nilai prob 0.0000 yang artinya pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 juta rupiah akan memicu penurunan tingkat kemiskinan sebesar 500%. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar - 0.691945 dengan prob. 0.0009 yang artinya variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana dengan adanya peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1% maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 69,19%.

2. Analisis Jalur Tidak Langsung

Analisis jalur tidak langsung dalam penelitian ini bertujuan itu mengidentifikasi pengaruh variabel pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan melalui variabel pendapatan per kapita. Dalam analisis pengaruh tidak langsung di gunakan uji sobel dengan hasil pada gambar berikut.

	Statistik uji:	Kesalahan Standar:	nilai p :
Uji Sobel:	2.88991346	0.3834002	0.00385348
Tes Aroian:	2.88102767	0.3845827	0.00396381
Uji Goodman:	2.89888198	0.38221405	0.00374496
Reset all	Menghitung		

Grafik 3. Hasil Uji Sobel

Nilai p-value/prob. diperoleh sebesar $0.00385348 < 0.05$ dengan nilai *Statistic Sobel Test* sebesar $2.88991346 > 1.96$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan melalui variabel pendapatan per kapita (*intervening*) atau secara tidak langsung variabel pendapatan per kapita mampu memediasi pengaruh variabel pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan hasil analisis, variabel X (Pertumbuhan Penduduk) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel Z (Pendapatan Perkapita), ditunjukkan oleh nilai koefisien -0.221256 dengan t-statistik sebesar -2.972144 dan nilai probabilitas signifikansi 0.0054, yang berada di bawah batas 0.05. Ini berarti terdapat dampak antara pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan per kapita yaitu negatif dan signifikan. Nilai

adjusted R-square sebesar 0.187826 menandakan bahwa pengaruh variabel X terhadap Z berkontribusi sebesar 18.78%. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap pendapatan per kapita, meskipun dalam proporsi yang terbatas. Pengaruh negatif pada koefisien -0.221256 menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk berpotensi menurunkan pendapatan per kapita, dimana variabel ini cenderung mengurangi daya dukung ekonomi per individu karena penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas ekonomi yang setara.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin (2021) mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Berau juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita (Muslimin, 2021). Pada penelitian ini menekankan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai dapat menurunkan pendapatan per kapita. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, agar kenaikan produk domestik bruto (PDRB) mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Persentase Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara pertumbuhan penduduk dan persentase kemiskinan di wilayah yang diteliti. Pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan perkembangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang memadai, berdampak langsung pada kenaikan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kapasitas ekonomi menyebabkan keterbatasan sumber daya per kapita, sehingga masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang berujung pada penurunan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk menambah beban pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya menghambat upaya pengurangan kemiskinan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iqbal Salsabil & Westi Rianti (2023), dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak diiringi dengan peningkatan ekonomi yang cukup malah menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Salsabil dan Riani menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan akan

menyebabkan kemiskinan meningkat, terutama ketika pertumbuhan penduduk berada di atas tingkat pengembangan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Persentase Kemiskinan

Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Karena nilai *t*-hitung negatif, maka interpretasi koefisien menunjukkan hubungan terbalik: peningkatan pendapatan per kapita cenderung mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa teori ekonomi yang mengaitkan pendapatan dengan pengentasan kemiskinan. Teori dasar ekonomi pembangunan menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, yang akhirnya mengurangi kemiskinan. Teori kesejahteraan ekonomi (*welfare economics*), misalnya, mengasumsikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat mampu mendorong kesejahteraan yang lebih tinggi, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, dan memungkinkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu M. Sinaga et al. (2023), menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan menurunkan kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fuadi et al. (2024) bahwa pendapatan per kapita mampu memberikan dampak signifikan pada pengurangan kemiskinan, karena peningkatan dalam pendapatan memungkinkan individu untuk mengakses kebutuhan hidup yang lebih baik, menekan ketergantungan pada bantuan, dan memudahkan masyarakat dalam berkontribusi pada perekonomian.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Persentase Kemiskinan Melalui Pendapatan Per Kapita

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya, peningkatan pendapatan per kapita berkorelasi dengan penurunan persentase kemiskinan. Hasil pengujian Sobel mendukung mekanisme mediasi pendapatan per kapita dalam model ini. Pertumbuhan penduduk berpotensi mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya memperkuat posisi hipotesis bahwa pendapatan per kapita adalah variabel

kunci dalam konteks pengentasan kemiskinan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Rifai (2020), yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk secara signifikan mempengaruhi kemiskinan ketika dianalisis melalui variabel pendapatan per kapita. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penduduk, jika diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, dapat berkontribusi pada penurunan persentase kemiskinan. Berdasarkan observasi di lapangan, peningkatan pendapatan per kapita memiliki dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan, namun faktor-faktor struktural masih memengaruhi distribusi pendapatan yang tidak merata. Di banyak wilayah, seperti di Kota Banda Aceh, peningkatan penduduk secara signifikan meningkatkan jumlah tenaga kerja, tetapi terbatasnya lapangan pekerjaan menghambat potensi penurunan angka kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, sekaligus berdampak positif terhadap peningkatan persentase kemiskinan. Di sisi lain, pendapatan per kapita terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Lebih lanjut, analisis Sobel Test mengonfirmasi peran pendapatan per kapita sebagai variabel intervening yang signifikan, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memengaruhi kemiskinan tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui penurunan pendapatan per kapita. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan, di mana kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pendapatan dapat memitigasi dampak negatif dari pertumbuhan populasi.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam mengenai interaksi antara pertumbuhan pendapatan per kapita, kualitas pendidikan, dan akses teknologi dalam konteks pengurangan kemiskinan. Penelitian ini sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat memperkuat atau menghambat hubungan tersebut, serta mengeksplorasi peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Dengan

pendekatan yang lebih komprehensif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

DAFTAR REFERENSI

- Fuadi, Z., Zainudding, & Mahdi. (2024). Dampak Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 200–207.
- Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Junaidi, & Hardiani. (2009). *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan* (Junaidi (ed.)). Hamada Prima.
- Kartiningrum, E. D., Notobroto, B. H., Otok, B. W., Kumarijati, E. N., & Endang, Y. (2022). *Aplikasi Regresi dan Korelasi Dalam Analisis Data Hasil Penelitian* (R. L. Mahmudah (ed.)). Penerbit STIKES Majapahit Mojokerto.
- Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society (First Edition). In *The Economics of Population: Key Classic Writings* (1 ed.). Electronic Scholarly Publishing Project. <https://doi.org/10.4324/9781351291521-31>
- Muslimin. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Berau. *Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 5(1), 27–37.
- Pinontoan, M. (2020). Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat : Suatu Kajian Teoritis, Pragmatis dan Holistik. In *PT Nasya Expanding* (1 ed.). PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Rifa'i, M. A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Persentase Kemiskinan Melalui Pendapatan Per Kapita Di Negara Berkembang. In *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (Vol. 8, Nomor 75). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Safrida. (2019). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Otonomi Khusus “Kajian Dalam Bidang Infrastruktur Pasar di Kota Lhokseumawe.” In H. Iskandar, R. Kurniawan, & B. Rahman (Ed.), *Unimal Press*. UNIMAL Press.
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaaruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnemi*, 5(1), 140–152. <https://doi.org/10.36985/ekuilnemi.v5i1.699>
- Sinaga, O. (2010). Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Implementasi Kerja Sama Internasional. In D. J. Iskandar (Ed.), *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil* (Vol. 2, Nomor 2). Lepsindo. <https://doi.org/10.24912/jmts.v2i2.8798>
- Sugiyono. (2013). *Metodo Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta.
- Suparmono. (2018). Pengantar Ekonomi Makro Teori, Soal dan Penyelesaiannya. In *Terjemahan Chriswan Sungkono*. Jakarta: Salemba Empat (Kedua). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In *Pearson* (13TH ed., Nomor 13th Edition). PEARSON.
- Wahed, M., Sishadiyati, & Imaningsih, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan kajian Teori dan Studi Empiris* (W. Afrida (ed.); Pertama). Mitra Cendekia Media.